



DINAS KESEHATAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (TAHUN 2024)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT dan atas Petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini sebagai bentuk laporan kinerja selama 1 (satu) tahun atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar atas Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di bidang Kesehatan.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 6 Februari 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPULAUAN SELAYAR**

dr. H. Husaini, M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651214 199803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Nrgara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	6
BAB II HASIL PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN NEGARA	9
2.1 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.....	9
2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksana Program dan Kegiatan.....	9
2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	25
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	27
2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan	29
2.1.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2024	30
2.1.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2024.....	31
BAB III PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertugas menangani Urusan Pemerintah Dasar Kesehatan. Dinas Kesehatan membawahi 15 Puskesmas aktif yang terletak di wilayah kepulauan dan daratan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga membawahi 2 buah Rumah Sakit yaitu; RSUD KH Hayyung dan RS Pratama Jampea.

Tipe Kantor dari Dinas Kesehatan adalah Tipe A, hal ini terwujud dari uraian tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan yakni urusan pemerintah dasar kesehatan, beralamat di jalan K.H. Ahmad Dahlan Parappak Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu. Email: Dinaskabselayar2020@gmail.com dengan titik koordinat X-6.135375 dan Y 120.461927.



Tugas dan fungsi Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dimana salah satu fungsi Dinas Kesehatan adalah melakukan perumusan kebijakan urusan pemerintah Bidang Kesehatan. Perumusan Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah Bidang Kesehatan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

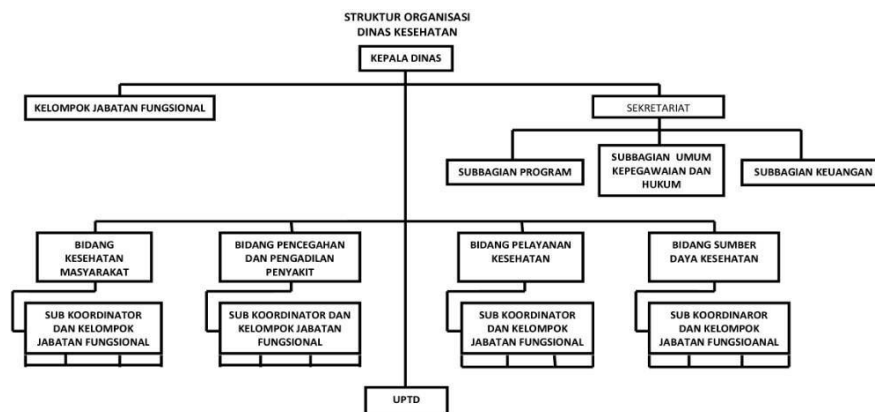
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub bagian Program dan Pelaporan.
 - b. Sub bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi kesehatan keluarga dan gizi.
 - b. Sesi promosi dan pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Seksi kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
 - a. Seksi surveilans dan imunisasi.
 - b. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- c. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi pelayanan kesehatan primer.
 - b. Seksi pelayanan kesehatan rujukan.
 - c. Seksi pelayanan kesehatan tradisional.
- 6. Bidang Sumber Daya kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan.
 - b. Seksi saran dan prasarana kesehatan.
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Kesehatan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Unit Pelaksana Tekhnis
 - a. RSUD K.H Hayyung
 - b. RSUD Pratama Jampea
 - c. UPTD Puskesmas Parangia
 - d. UPTD Puskesmas Bontomatene
 - e. UPTD Puskesmas Buki
 - f. UPTD Puskesmas Barugaia
 - g. UPTD Puskesmas Polebunging
 - h. UPTD Puskesmas Benteng
 - i. UPTD Puskesmas Bontosunggu
 - j. UPTD Puskesmas Bontosikuyu
 - k. UPTD Puskesmas Lowa
 - l. UPTD Puskesmas Pasilambena
 - m. UPTD Puskesmas Pasimarannu
 - n. UPTD Puskesmas Benteng Jampea
 - o. UPTD Puskesmas Ujung Jampea
 - p. UPTD Puskesmas Pasitallu
 - q. UPTD Puskesmas Bontoharu

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar I.1
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar



Struktur Organisasi Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 75 Tahun 2020

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dengan Sub Bidang sebagaimana struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah Bidang Kesehatan
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris, Pimpinan oleh Sekretariat yang memiliki fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan Program dan Pelaporan, Umum, Hukum dan Kepegawaian, serta Keuangan dalam lingkup Dinas.

- Dalam melaksanakan tugasnya fungsi Sekeretariat adalah;
- a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas.
 - b. Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan.
 - c. Pengordinasian urusan Umum, Hukum dan Kepegawaian.
 - d. Pengordinasian pengelolaan keuangan ; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Memiliki Fungsi ;
- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknisbidang kesehatan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporanbidang kesehatan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang Kesehatan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit. Kepala Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi sebagai ;
- a. Perumusan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - b. Pelaksanaan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinsan lain sesuai bidang dan tugasnya.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional,pelayanan

rujukan, serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu.

Fungsi kepala bidang pelayanan kesehatan adalah;

- a. Perumusan teknis bidang pelayanan kesehatan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan Kebijakan teknis sumber daya kesehatan. Kepala Bidang sumber daya mempunyai fungsi ;
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Dinas kesehatan Kepulauan Selayar pada Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 572 pegawai dan pegawai Non ASN 1.030.

Berdasarkan jenjang Pendidikan, untuk pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kesehatan didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan SMA dengan jumlah 13 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 14 orang, S1 dengan jumlah 15 orang, S2 dengan jumlah 1 orang, dan untuk Profesi sebanyak orang dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 44 orang. Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 572 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 70 pegawai (12,24%), golongan III sebanyak 341 pegawai (59,62%), dan golongan II sebanyak 20 pegawai (3,50%), serta golongan I sebanyak 2 pegawai (0,35%) dan golongan P3K sebanyak 139 pegawai (24,30%),

dimana secara detail dapat dilihat pada table dan diagram berikut:

Tabel I.1

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan
Golongan / Ruang Tahun 2024

No	Golongan/ Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Golongan IV	70	12,24
2	Golongan III	341	59,61
3	Golongan II	20	3,50
4	Golongan I	2	0,35
5	Gol. Lainnya (P3K)	139	24,30
TOTAL		572	100%

Sumber : Dinas kesehatan Kepulauan Selayar 2024

Dari sisi kedudukan dalam Organisasi, dari 526 pegawai ASN terdapat 1 Pegawai (0,19%) yang menduduki Eselon II, 7 Pegawai (1,33%) yang menduduki Eselon III, 10 Pegawai (1,90%) yang menduduki Eselon IV, 426 pegawai (80,99%) yang termasuk dalam Jabatan Fungsional tertentu, serta 82 pegawai (15,59%) yang termasuk dalam Jabatan Fungsional Umum, Diman secara detail dapat dilihat pada table dan diagram berikut :

Tabel. I.2

Jumlah Pegawai ASN
yang Menduduki Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	0,19
2	Eselon III	7	1,33
3	Eselon IV	10	1,90
4	Jabatan Fungsional Tertentu	426	80,99
5	Jabatan Fungsional Umum	82	15,59
TOTAL		526	100 %

Sumber : Dinas kesehatan Kepulauan Selayar 2024

Selain itu Dinas Kesehatan memiliki jumlah Tenaga Kesehatan yang tersebar di 15 Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai berikut:

Tabel I.3
Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	%
1.	Dokter Spesialis	9	0,57
2.	Dokter Umum	33	2,10
3.	Dokter Gigi	16	1,02
4.	Perawat	447	28,45
5.	Bidan	593	37,74
6.	Kesehatan Masyarakat	101	6,42
7.	Kesehatan lingkungan	49	3,12
8.	Kefarmasian	39	2,49
9.	Apoteker	25	1,60
10.	Laboratorium	43	2,73
11.	Teknisi Medis	9	0,57
12.	Tenaga penunjang	204	12,99
13.	Nutrisi	3	0,20
TOTAL		1.571	100 %

Sumber : Dinas kesehatan Kepulauan Selayar 2024

BAB II

HASIL PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN NEGARA

2.1 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksana Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.226.493.596.693,- dengan rincian Belanja Operasional Rp. 190.430.017.993,- dan Belanja Modal Rp. Rp.36.063.578.700,-, selanjutnya melalui Mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp. 176.846.238.353,- dengan rincian Belanja Operasional Rp.130.575.863.453,- dan Belanja Modal Rp.46.270.374.900,-.

Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp176.846.238.353,-, anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp.145.378.551.467 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.31.467.686.886 dengan rata- rata capaian kinerja Program kegiatan mencapai 85 % dengan realisasi keuangan sebanyak 82,20 % .

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 melaksanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan melaksanakan 4 Program dan 11 kegiatan dengan 46 sub kegiatan.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel. II.1
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.089.350.465	57.948.638.292			
				1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,46%			
					80.750.000	80.314.500			
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	97,8%			
					5.000.000	4.890.000			
				b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	99,99%			
					5.000.000	4.999.500			
				c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	99,31%			
					7.250.000	7.200.000			
				d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	99%			
					5.000.000	4.950.000			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	99,58%			
					58.500.000	58.275.000			
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	82,50%			
					67.632.421.865	55.796.205.952			
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	82,5%			
					67.609.670.000	55.775.468.652			
				b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%	80,05%			
					9.322.000	7.461.800			
				c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	99,44%			
					6.938.865	6.900.000			
				d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	98,22%			
					6.491.000	6.375.500			
				3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	98,03%			
					101.600.000	99.600.000			
				a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%	98,03%			
					101.600.000	99.600.000			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98,7%			
					10.000.000	9.870.000			
				a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	98,7%			
					10.000.000	9.870.000			
				5. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100%	96,27%			
					966.431.500	930.385.950			
				a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	88,93%			
					305.674.000	271.840.000			
				b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	88,59%			
					19.379.500	17.167.950			
				c. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%			
					3.840.000	3.840.000			
				d. Fasilitas kunjungan Tamu	100%	100%			
					20.721.000	20.712.000			
				e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%			
					616.826.000	616.826.000			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	71,65%			
					843.334.100	604.235.440			
				a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	70,89%			
					821.427.000	582.328.340			
				b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%			
					21.907.100	21.907.100			
				7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,11%			
					454.813.000	428.026.450			
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	100%			
					310.966.000	310.966.000			
				b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	96,43%			
					121.397.000	117.060.450			
				c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	0			
					22.450.000	0			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	96.074.871.888	79.005.837.075			
				8. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	100%	91,02%			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					26.649.021.740	24.257.180.999			
				a. Pembangunan Puskesmas	100%	93,02%			
					14.166.520.300	13.177.421.436			
				b. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	92,98%			
					1.324.240.845	1.231.240.845			
				c. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	100%	95,28%			
					4.374.567.500	4.168.053.340			
				d. Pengembangan Puskesmas	100%	85,67%			
					5.198.742.700	4.453.954.000			
				e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100%	94,19%			
					200.000.000	188.374.784			
				f. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	0			
					178.585.000	0			
				g. Pengembangan Rumah Sakit	100%	100%			
					280.000.000	280.000.000			
				h. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100%	81,84%			
					926.365.395	758.163.594			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	100%	78,86%			
					69.425.850.148	54.748.656.076			
				a. Pengelolaah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	97,41%			
					1.388.796.000	1.352.876.000			
				b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	96,26%			
					379.083.000	364.899.000			
				c. Pengelolaan pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	99,87%			
					120.000.000	149.849.000			
				d. Pengelolaan pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	98,79%			
					558.750.000	552.000.000			
				e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa Berat	100%	37,53%			
					12.710.000	4.770.000			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	100%	73,63%			
					581.250.000	427.956.300			
				g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	98,22%			
					143.400.000	140.850.000			
				h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	19,24%	Tidak terlaksananya PMT LOKAL Puskesmas karena tidak terdapat penyedia E katalog (pihak ketiga)	Harus disediakan rekanang atau penyedia E katalog (pihak ketiga)	
					3.304.786.000	635.946.000			
				i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	95,98%			
					6.505.202.748	5.041.481.818			
				j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan tradisional Lainnya	100%	82,78%			
					140.058.800	115.948.600			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				k. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	76,84%			
					422.398.000	324.590.000			
				l. Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	71,19%			
					2.312.695.000	1.646.375.252			
				m. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	96,98%			
					43.238.600.000	35.935.160.037			
				n. Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	76,87%			
					9.781.958.100	7.519.791.569			
				o. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	93,19%			
					536.162.500	536.162.500			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.418.615.000	8.186.914.300			
				10. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	100%	78,58%			
					10.418.615.000	8.186.914.300			
				a. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	78,58%			
					10.418.615.000	8.186.914.300			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	263.401.000	237.161.800			
				11. Pemberian Izin Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	90,04%			
					263.401.000	237.161.800			
				a. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	90,04%			
					263.401.000	237.161.800			
				JUMLAH	176.846.238.353	145.378.551.467			

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator capaian kinerja kegiatan adalah tersedianya Dokumen Rencana Kerja tahun OPD (renja Pokok dan renja perubahan) dengan jumlah anggaran Rp.5.000.000,- dan hasilnya 2 Dokumen Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- dan hasilnya 1 Dokumen RKA Dinas Kesehatan Tahun 2024;
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah tersedianya Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 7.250.000,- dan hasilnya adalah 1 Dokumen RKA Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024;
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah tersedianya Dokumen DPA Pokok dengan jumlah anggaran Rp.5.000.000,- dan hasilnya adalah 1 Dokumen DPA Dinas Kesehatan Tahun 2024;
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Indikator capaian kinerja tersedianya Laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp.58.500.000,- dan hasilnya adalah 1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024;

b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu:

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Indikator capaian kinerja kegiatan adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan dengan target 100% dengan jumlah anggaran Rp. 67.609.670.000,- dan keluarannya adalah terpenuhinya Gaji PNS Dinas Kesehatan.

- Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi dengan jumlah anggaran Rp.9.322.000,- dan keluarannya 1 Dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan.
 - Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah terlaksananya Perjurnalan keuangan dengan jumlah anggaran Rp.6.938.865,- dan keluarannya 1 Dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD.
 - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah jumlah Dokumen As et dan Laporan keuangan yang tersusun dengan Target 100% dengan jumlah anggaran Rp.6.491.000,- dan keluarannya 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
 - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah terpantaunya pelaporan keuangan baik perbulan maupun persemester dengan jumlah anggaran RP.6.491.000,-.
- c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. program tersebut terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu:
- Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ketersediaan arsip dan Dokumen penyusunan Laporan barang milik daerah yang tersusun dengan Target 100 % dengan jumlah anggaran Rp.101.600.000,- dan keluarannya adalah tersedianya Laporan Barang Milik Daerah.
- d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah program tersebut terdiri dari 1 Sub kegiatan yaitu :
- Sub kegiatan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai. indikator capaian kinerja kegiatan adalah terlaksananya evaluasi dan Monitoring penilaian penilaian dengan Target 100 % dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000,- dan keluarannya 1 Laporan pelaksanaan monitoring kinerja pegawai.
- e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah. program tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- Sub kegiatan penyediaan dan peralatan Perlengkapan Kantor. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ketersediaan perlengkapan dan peralatan Kantor Dinas Kesehatan dan

- jaringannya dengan jumlah anggaran Rp 305.674.000,- dan keluarannya 1 paket.
- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ketersediaan alat dan bahan cetak dan pengadaan Dinas Kesehatan dan jaringannya dengan Target 100% dengan jumlah anggaran Rp.19.379.500,- dan keluarannya 2 paket.
 - Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan . Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ketersediaan Dokumen bacaan dan perundang-undangan Dinas Kesehatan dengan Target 100% dengan jumlah anggaran Rp.3.840.000,- dan keluarannya 1 Dokumen.
 - Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah telah tersedia 1 laporan fasilitasi kunjungan tamu dinkes tahun 2023 dengan jumlah anggaran Rp.20.712.000.
 - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah tersedianya Laporan konsultasi dan koordinasi SKPD dan keluarannya 2 Laporan dengan jumlah anggaran Rp. 616.826.000.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program tersebut terdiri dari Sub Kegiatan yaitu :
- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah adanya Laporan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan dan jaringannya dengan jumlah anggaran Rp.821.427.000,- dan keluarannya 2 laporan.
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor. Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah ketersediaannya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.21.907.100,- dan keluarannya 2 Dokumen.
- g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Program tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator capaian Kinerja sub kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan Dinas untuk memudahkan proses Operasional Kantor dan Lapangan dengan jumlah anggaran Rp.310.966.000,- dan keluarannya 223 unit.

- Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah terpeliharanya Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp.121.397.000,- dan keluarannya 1 unit.
2. Pogram pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- a. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota. Program tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- Sub kegiatan pembangunan Puskesmas. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah sebagai peran serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas dengan jumlah anggaran Rp.14.166.520.300,- dan keluarannya 1 Unit.
 - Sub kegiatan pembangunan fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah sebagai peran serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan dengan jumlah anggaran Rp.1.324.240.845,- dan keluarannya 2 unit.
 - Sub kegiatan pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah sebagai peran serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan dengan jumlah anggaran Rp.4.374.567.500,- dan keluarannya 3 unit.
 - Sub kegiatan pengembangan Puskesmas. Indikator capaian kinerja Sub kegiatan adalah terselenggaranya Pengembangan Puskesmas dengan jumlah anggaran Rp.5.198.742.700,- dan keluarannya 2 unit.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah terselenggaranya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- dan keluarannya 3 Unit.
 - Sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah ketersediaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan demi kelancaran pelayanan dengan jumlah anggaran Rp.178.585.000,- dan keluarannya 15 puskesmas.
 - Sub kegiatan pengembangan Rumah Sakit. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah memberi kemudahan dan kenyamanan Pegawai dalam menjalankan tugas dan pelayanan dengan jumlah anggaran Rp. 280.000.000, dan keluarannya 1 unit.
 - Sub kegiatan pengadaan Obat, bahan habis pakai, bahan medis

habis pakai, vaksin, makanan minuman di fasilitas Kesehatan. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah ketersediaan Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan minuman demi kelancaran pelayanan dengan jumlah anggaran Rp.926.365.395,- dan keluarannya 15 puskesmas.

- b. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten / Kota. Program tersebut terdiri dari beberapa sub Kegiatan yaitu :
- Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu hamil. Indikator capaian kinerja sub Kegiatan adalah meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Dengan jumlah anggaran Rp.1.388.796.000,- dan keluarannya 30 Orang.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah meningkatkan angka harapan hidup ibu dalam persalinan dengan jumlah anggaran Rp. 379.083.000,- dan keluarannya 30 Orang.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan jumlah anggaran Rp. 120.000.000,- dan keluarannya 93 Orang.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan jumlah anggaran Rp. 558.750.000,- dan keluarannya 20 Orang.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dengan jumlah anggaran Rp. 12.710.000,- dan keluarannya 20 Orang.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis. Indikator capaian Kinerja sub kegiatan adalah meningkatkan penemuan dan deteksi dini Tb di masyarakat dan kelompok berisiko. dengan jumlah anggaran Rp.581.250.000,- dan keluarannya 20 Orang.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya sero survei penyakit HIV /AIDS dengan jumlah anggaran Rp.143.400.000,- dan keluarannya 20 Orang.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan Gizi masyarakat.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah meningkatkan mutu gizi persorangan dan masyarakat. dengan jumlah anggaran Rp.3.304.786.000-, dan keluarannya 15 Puskesmas.

- Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah tercapainya pembinaan dan pengawasan TTU, tercapainya pengelolaan sampah medis, tercapainya penyusunan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) Dan terlaksananya pembangunan jamban Keluarga dengan jumlah anggaran Rp. 6.505.202.748,- dan keluarannya 1 Dokumen.
 - Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akuputur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah kelompok asuhan mandiri mampu melakukan asuhan mandiri dengan pemanfaatan TOGA dan peningkatan capaian program yankestrad dengan jumlah anggaran Rp. 140.058.800,- dan keluarannya 1 Dokumen.
 - Sub kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah meningkatnya sinergisitas dan kolaborasi program di Puskesmas dengan jumlah anggaran Rp.422.398.000,- dan keluarannya 1 Dokumen.
 - Sub kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan jumlah anggaran Rp.2.312.695.000,- dan keluarannya 1 Dokumen.
- Sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan yang dilayani dan jumlah peserta JKN yang ditangani dengan jumlah anggaran Rp.43.238.600.000,- dan keluarannya 1 Dokumen.
- Sub kegiatan operasional pelayanan Puskesmas. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah tercapainya operasional pelayanan puskesmas dengan jumlah anggaran Rp.9.781.958.100,-, dan keluarannya 1 Dokumen.
 - Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dengan jumlah anggaran Rp.536.162.500,-, Dan keluarannya 1 Dokumen.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Program tersebut terdiri dari satu kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sumber daya manusia kesehatan. Indikator capaian kinerja dengan jumlah anggaran Rp.10.418.615.000,- dan keluarannya 1 Dokumen.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

a. Kegiatan Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Indikator capaian kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 263.401.000,- dan keluarannya 1 Dokumen.

2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Pelaksanaan urusan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang keberhasilannya dapat diukur dari persentase capaian indikator tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel. II.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ INDIKATORKINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5 = \frac{(4/3) \times 100}{0}$	6
Urusan Kesehatan						
Dinas Kesehatan						
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat : Indikator					
a.	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	69,48	73,48%	105,75%	
b.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	Angka	170/100.000 KH	313,4/100.000 KH	15,6%	
c	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Angka	4,2/1000 KH	10,6/1000 KH	25,2%	
d	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Angka	3%	7,32%	100%	
e	Presentase Balita Gizi Buruk (Sangat Kurus)	Persen	0,6%	1,13%	100%	
f	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Tipe (Succes Rute)	Persen	90%	35,96%	39,95%	
g	Persentase Desa/ Kelurahan UCI	Persen	95%	86,4%	90,95%	
h	Persentase Pelayanan Hipertensi	Persen	100%	100%	100%	
i	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	Persen	71%	79,7%	100%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan : Indikator					
a.	Persentase UKBM Aktif	Persen	100%	98,4%	98,4%	

Sumber: Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar 2024

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai satu urusan kesehatan yakni urusan Bidang kesehatan capaian Kinerja Berdasarkan Urusan disampaikan sebagai berikut :

Tabel. II.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Kunci Berdasarkan Urusan

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Ket
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
2	Urusan Bidang Kesehatan					
	Dinas Kesehatan					
	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	
	Persentase Balita Stunting	%	18,72%	16,91%	90,33	
	Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100	98,92	98,92	
	Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	
	Persentase Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	90,73	90,73	
	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	60,28	60,28	
	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	
	Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	70,93	70,93	
	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	
	Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	
	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	%	100	100	100	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Ket
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
2	Urusan Bidang Kesehatan					
	Dinas Kesehatan					
	Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	73,87	73,87	
	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	
	Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	Angka	36/1000 Penduduk	13,8/1000 Penduduk	38,33	
	Persentase Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	%	100	100	100	
	Persentase Penurunan Masalah Kesehatan Masyarakat	%	20,00	11,59	57,95	
	Nilai Akreditasi Masyarakat	Nilai	Utama	Utama	Utama	

Sumber: Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar 2024

2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan

Tabel. II.4

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Kesehatan								
.	Dinas Kesehatan	176.846.238.353	145.378.551.467	31.467.686.886	82,20%	4	85%	46	85%

Sumber: Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar 2024

2.1.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2024

Tabel II.5

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Non ASN	Perbub No. 36 Tahun 2024 / Tanggal 14 Mei 2024	Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara Pada Pusat Kesehatan Masyarakat	Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Motivasi Kerja dalam Memberikan pelayanan langsung Kepada Masyarakat Khususnya di Bidang Pelayanan Kesehatan Secara Maksimal	

2.1.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2024

Tabel II.6

No	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

PENUTUP

Sistematika penulisannya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berisi uraian kinerja urusan dan kinerja program aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, sesuai pelaksanaan urusan dalam kurun waktu anggaran tahun 2024.

Dari hasil Laporan keterangan pertanggungjawaban ini diharapkan adanya hasil evaluasi dewan perwakilan Rakyat Daerah, dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi nantinya akan dicermati, diperhatikan, dikoordinasikan dan ditindaklanjuti guna terwujudnya peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2021 – 2026 dapat tercapai.

Menyadari sepenuhnya, Laporan ini tak luput dari kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan penunjang pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. Segenap keberhasilan, prestasi maupun keterlambatan dan ketidak-sempurnaan dalam pengelolaan selama tahun 2024 telah disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, semoga Allah SWT akan selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dan semoga selalu meridhoi setiap usaha dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat.

Benteng, 6 Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPULAUAN SELAYAR,

dr. H. Husaini, M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651214 199803 1 005